

Mengkaji Sistem Pendidikan New Zealand: Inspirasi bagi Penguatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Yuyun Budiarti, Achmad Basari Eko Wahyudi

Universitas Negeri Sebelas Maret
yuyunbudiarti02@student.uns.ac.id

Article History

accepted 1/7/2026

approved 1/8/2026

published 21/9/2026

Abstract

New Zealand's internationally acknowledged education system offers a relevant point of reference for Indonesia, which is currently reforming its schooling through the Merdeka Curriculum. This article investigates the defining features of the New Zealand education system and discusses how these features may inform efforts to raise educational quality in Indonesia. Employing a qualitative design, the study reviewed 18 sources comprising OECD publications and DOI-indexed articles from national and international journals. Qualitative content analysis was carried out in three stages, namely preparation, organization, and reporting, while source triangulation was used to establish the credibility of the findings. The review reveals that New Zealand's achievements rest on a flexible, competency-oriented curriculum, inquiry-driven pedagogy, authentic assessment grounded in assessment for learning, and a teaching workforce sustained by ongoing professional learning. Inclusive policies, school self-management, and the embedding of Maori cultural values in curriculum and pedagogy further underpin these achievements. For Indonesia, such features can be contextually adapted to reinforce the Merdeka Curriculum, formative assessment practices, teacher professional development, and a Pancasila Student Profile rooted in local wisdom. Accordingly, New Zealand's experience can serve as a point of reflection for Indonesian education, on the condition that any adaptation remains sensitive to the country's social, cultural, and institutional realities.

Keywords: *New Zealand, education system, curriculum, education quality, comparative education*

Abstrak

Pembaruan pendidikan di Indonesia melalui Kurikulum Merdeka memerlukan acuan praktik unggul dari negara lain, dan New Zealand merupakan salah satu negara yang sistem pendidikannya memperoleh pengakuan global. Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah ciri-ciri pokok sistem pendidikan New Zealand sekaligus menguraikannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Rancangan kualitatif berbasis studi kepustakaan diterapkan pada 18 sumber yang mencakup publikasi OECD serta artikel jurnal nasional dan internasional yang memiliki DOI; analisis isi kualitatif dilakukan melalui tahap persiapan, pengorganisasian, dan pelaporan, sementara kredibilitas temuan diperkuat dengan triangulasi sumber. Temuan memperlihatkan bahwa capaian pendidikan New Zealand bertumpu pada kurikulum berorientasi kompetensi yang lentur, pedagogi berbasis inkuiri, penilaian autentik yang berlandaskan *assessment for learning*, dan tenaga pendidik yang profesionalismenya terus dipupuk melalui pembelajaran profesional berkelanjutan. Capaian itu turut ditopang oleh kebijakan yang inklusif, kewenangan otonom sekolah, serta pengintegrasian nilai-nilai budaya Maori ke dalam kurikulum dan praktik pedagogis. Bagi Indonesia, ciri-ciri tersebut dapat diadaptasi secara kontekstual guna memperkuat pelaksanaan Kurikulum Merdeka, praktik asesmen formatif, pengembangan keprofesian guru, dan Profil Pelajar Pancasila yang berakar pada kearifan lokal. Oleh sebab itu, pengalaman New Zealand layak dijadikan bahan refleksi bagi perbaikan mutu pendidikan nasional, dengan syarat proses adaptasinya memperhatikan realitas sosial, budaya, dan kelembagaan Indonesia.

Kata kunci: *New Zealand, sistem pendidikan, kurikulum, mutu pendidikan, pendidikan komparatif*



PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan di berbagai belahan dunia dihadapkan pada tuntutan yang kian kompleks. Pesatnya kemajuan teknologi, pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, serta dinamika global mengharuskan hadirnya sumber daya manusia yang unggul bukan hanya dalam ranah akademik, melainkan juga kreatif, lentur dalam beradaptasi, berkarakter kuat, dan bersedia terus belajar sepanjang hidup. Menyikapi kondisi tersebut, banyak negara berupaya membenahi sistem pendidikannya agar senantiasa selaras dengan perkembangan zaman (Saputra et al., 2024; Schleicher, 2018). Kajian pendidikan komparatif kerap dimanfaatkan untuk mempelajari praktik unggul dari negara lain sekaligus menimbang peluang penerapannya dalam konteks yang berlainan, meskipun praktik semacam itu tidak semestinya dialihkan secara mentah tanpa memperhitungkan kondisi negara yang mengadopsinya (Phillips & Ochs, 2003). Dalam khazanah kajian komparatif, New Zealand termasuk negara yang paling banyak dirujuk, mengingat mutu sistem pendidikannya secara ajek diakui di tingkat internasional, sebagaimana tergambar dalam laporan *Education at a Glance* terbitan OECD (2019, 2022).

Capaian pendidikan New Zealand tidak lahir secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang progresif dan inovatif, kurikulum yang lentur dan menempatkan peserta didik sebagai pusat, serta keteguhan dalam menjamin kesetaraan akses tanpa mengabaikan mutu. Menurut Saputra et al. (2024), keluwesan kurikulum, pengajaran yang berorientasi pada siswa, dan pemanfaatan teknologi merupakan penopang utama keberhasilan sistem pendidikan negara tersebut. Lebih jauh, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya Maori sebagai masyarakat asli memberikan kekhasan tersendiri pada sistem pendidikan New Zealand, sekaligus menjadikannya contoh integrasi bikultural yang tergolong langka di antara negara-negara maju.

Sementara itu, Indonesia tengah menjalani proses transformasi pendidikan yang cukup mendasar. Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, serta asesmen formatif merupakan rangkaian kebijakan yang diarahkan untuk mendongkrak kualitas pendidikan nasional. Kendati demikian, sejumlah hambatan masih dijumpai, di antaranya ketimpangan sarana dan prasarana antarwilayah, persebaran tenaga pendidik yang belum proporsional, serta jaringan digital yang belum menjangkau semua daerah. Situasi tersebut membuat kajian perbandingan dengan negara maju seperti New Zealand, yang senantiasa menempati posisi baik pada beragam indikator pendidikan OECD (2019, 2022), menjadi penting sebagai rujukan inspiratif dan bahan renungan dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pendidikan New Zealand dari beragam perspektif. Saputra et al. (2024) melakukan analisis menyeluruh terhadap program pendidikan New Zealand dan mendapati bahwa *The New Zealand Curriculum* (NZC), dengan penekanannya pada kompetensi kunci, efektif membekali siswa dengan keterampilan yang bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Kajian Court dan O'Neill (2011) berfokus pada reformasi *Tomorrow's Schools* yang mengalihkan tata kelola sekolah di New Zealand ke arah desentralisasi, sedangkan Hunter et al. (2016) menggarisbawahi arti penting penghargaan terhadap bahasa dan nilai budaya Pasifika dalam upaya mencapai kesetaraan hasil belajar kelompok minoritas.

Namun, sebagian besar studi tersebut hanya menitikberatkan pada satu dimensi, misalnya kurikulum, pengelolaan sekolah, atau kesetaraan bagi kelompok minoritas. Akibatnya, telaah yang menggambarkan sistem pendidikan New Zealand secara utuh dan terpadu sebagai sumber inspirasi bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia belum banyak dilakukan. Celah inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian yang menyoroti sistem pendidikan New Zealand secara lebih komprehensif dan terstruktur. Atas dasar itu, artikel ini ditujukan untuk menelaah ciri-ciri utama sistem pendidikan New Zealand, yang mencakup filosofi, kurikulum, metode pembelajaran, sistem penilaian,

profesionalisme guru, pendidikan inklusif, serta integrasi budaya Maori, kemudian menguraikan relevansi dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

METODE

Kajian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni metode untuk menghimpun, menilai, dan memadukan hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Snyder, 2019). Seluruh dokumen kebijakan, laporan resmi, dan artikel ilmiah diposisikan sebagai data yang ditelaah melalui analisis dokumen, yaitu langkah terstruktur dalam mengkaji serta menginterpretasikan bahan tertulis, baik cetak maupun digital, untuk menggali makna dan membangun pemahaman empiris (Bowen, 2009). Data dihimpun dari laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan artikel ilmiah bereputasi yang mengulas sistem pendidikan New Zealand beserta perbandingannya dengan Indonesia. Penelusuran literatur memanfaatkan Google Scholar, Crossref, laman penerbit (Taylor & Francis, Springer, Elsevier, SAGE), dan OECD iLibrary, dengan memprioritaskan terbitan yang dilengkapi *Digital Object Identifier* (DOI) agar asal-usul dan keabsahan sumber dapat ditelusuri.

Sumber yang dilibatkan dalam kajian harus memenuhi empat kriteria inklusi, yaitu: (1) mengulas ciri sistem pendidikan New Zealand (kurikulum, pembelajaran, asesmen, profesionalisme guru, inklusivitas, maupun integrasi budaya) atau berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan Indonesia; (2) berupa artikel jurnal yang telah ditelaah sejawat atau laporan resmi lembaga internasional; (3) memiliki DOI; serta (4) tersedia dalam bentuk teks lengkap. Penyaringan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan 18 sumber yang terbit antara tahun 1998 dan 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Sumber Data yang Dikaji

No	Kategori Sumber	Jumlah	Sumber yang Dikaji	Asal Sumber / Penerbit
1	Laporan lembaga internasional	3	OECD (2019); OECD (2022); Schleicher (2018)	OECD Publishing (OECD iLibrary)
2	Artikel jurnal internasional tentang pendidikan New Zealand	7	Bishop et al. (2009); Court & O'Neill (2011); Crooks (2011); Hunter et al. (2016); MacArthur & Rutherford (2016); McChesney et al. (2024); Mutch (2012)	Springer (NZJES), Taylor & Francis, Elsevier, SAGE
3	Artikel jurnal internasional tentang asesmen, profesionalisme guru, dan pendidikan komparatif	4	Black & Wiliam (1998); Darling-Hammond (2017); Hattie & Timperley (2007); Phillips & Ochs (2003)	Taylor & Francis, SAGE (AERA)
4	Artikel jurnal nasional tentang pendidikan New Zealand dan Indonesia	4	Alimuddin (2023); Rokayah et al. (2023); Saputra et al. (2024); Suminar et al. (2023)	Jurnal nasional terindeks (JVEIT, Mimbar Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL)
Jumlah		18		

Keterangan: Di luar 18 sumber tersebut, prosedur penelitian dilandaskan pada sejumlah literatur metodologis (Bowen, 2009; Carter et al., 2014; Elo & Kyngäs, 2008; Snyder, 2019).

Data dianalisis dengan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) mengikuti tahapan yang dirumuskan Elo dan Kyngäs (2008), yang meliputi: (1) tahap persiapan,

yaitu menghimpun dan menyeleksi literatur yang relevan, kemudian membacanya secara cermat untuk menangkap isinya; (2) tahap pengorganisasian, yaitu memberi kode dan mengategorikan data ke dalam sejumlah tema pokok mengenai ciri sistem pendidikan New Zealand, meliputi filosofi, kurikulum, kebijakan inklusif, metode pembelajaran, asesmen, profesionalisme guru, dan integrasi budaya; dan (3) tahap pelaporan, yaitu memadukan temuan serta merumuskan implikasinya bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan mengonfrontasikan temuan dari beragam artikel ilmiah dan laporan resmi sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan dapat dipercaya (Carter et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Filosofi Sistem Pendidikan New Zealand

Jenjang pendidikan di New Zealand tersusun secara berkesinambungan, dimulai dari pendidikan anak usia dini (*Early Childhood Education/ECE*), dilanjutkan ke *primary school*, *intermediate school*, dan *secondary school*, kemudian berujung pada pendidikan tinggi (*tertiary education*). Masa pendidikan sekolah ditempuh selama 13 tahun, dan mayoritas sekolah dibiayai oleh pemerintah. Seluruh warga negara bahkan dapat mengenyam pendidikan tanpa biaya hingga tingkat sekolah menengah atas, sehingga kendala finansial dalam memperoleh pendidikan bermutu dapat ditekan seminimal mungkin (OECD, 2019).

Dari sisi filosofis, pendidikan di New Zealand berlandaskan prinsip *student-centered learning*, *lifelong learning*, *equity and excellence*, *inclusive education*, dan *bicultural education*. Prinsip-prinsip itu memosisikan peserta didik sebagai pihak yang secara aktif mengonstruksi pengetahuannya sendiri lewat pengalaman belajar yang sarat makna. Kebijakan yang inklusif tersebut juga memberi keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan programnya dengan kebutuhan dan kondisi setempat, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan serta semangat belajar siswa (Saputra et al., 2024).

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Salah satu pilar utama sistem pendidikan New Zealand adalah kurikulum nasionalnya, yaitu *The New Zealand Curriculum* (NZC). Kurikulum ini berpijak pada lima kompetensi kunci, yakni berpikir; menggunakan bahasa, simbol, dan teks; mengelola diri; berhubungan dengan orang lain; serta berpartisipasi dan berkontribusi. Kelima kompetensi tersebut dijalin secara terpadu dengan delapan bidang pembelajaran, sehingga siswa mampu menangkap hubungan antarmata pelajaran dan membangun pemahaman yang menyeluruh (Saputra et al., 2024).

Kelebihan NZC terutama tampak pada sifatnya yang luwes, sebab kurikulum ini hanya menyediakan kerangka umum sehingga guru leluasa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Karakter tersebut memiliki kesamaan dengan Kurikulum Merdeka di Indonesia, karena keduanya mengedepankan penguasaan kompetensi alih-alih semata-mata penguasaan materi (Saputra et al., 2024).

Hasil penelitian Rokayah et al. (2023) memperlihatkan bahwa para pendidik di Indonesia pada umumnya memberikan tanggapan positif terhadap semangat Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada siswa. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh keengganan sebagian guru untuk berubah serta terbatasnya sumber daya pendukung.

Kondisi serupa juga ditemukan Alimuddin (2023) pada jenjang sekolah dasar. Asesmen diagnostik dan penyusunan modul ajar sudah dapat dijalankan, tetapi proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila belum berjalan maksimal karena minimnya pelatihan bagi guru dan belum mapannya kepemimpinan sekolah. Kenyataan ini memperlihatkan

bahwa efektivitas kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana NZC amat ditentukan oleh kesiapan pendidik serta dukungan institusional pada level satuan pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Akses

Keseriusan New Zealand dalam mewujudkan pendidikan inklusif terlihat dari kebijakan pembebasan biaya pendidikan mulai jenjang dasar hingga menengah atas, disertai pengawasan pemerintah atas standar mutu sekolah untuk menghindari ketimpangan antara sekolah di kota dan di desa (OECD, 2019). Melalui reformasi *Tomorrow's Schools*, kewenangan pengelolaan pendidikan dialihkan ke tingkat sekolah sehingga sekolah memiliki otonomi yang lebih luas; namun, kebijakan ini juga memicu dinamika baru berupa kompetisi antarsekolah dalam iklim yang semakin berorientasi pasar (Court & O'Neill, 2011).

Sebagai hasilnya, pemerataan akses pendidikan di New Zealand tergolong cukup tinggi, sebagaimana tergambar pada indikator partisipasi dan pembiayaan pendidikan dalam laporan *Education at a Glance* (OECD, 2022). Walaupun begitu, desentralisasi pengelolaan sekolah tetap mensyaratkan kemampuan manajerial yang memadai agar mutu pendidikan dapat merata secara nyata (Court & O'Neill, 2011).

MacArthur dan Rutherford (2016) mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan 'kebutuhan khusus' ke arah pendekatan berbasis hak (*rights-based*), sebab pemberian label 'khusus' kepada peserta didik justru berpotensi mengekalkan ketidaksetaraan, bukan menghapusnya.

Metode Pembelajaran Berbasis Inkuiri dan Aktif

Pembelajaran di New Zealand dirancang agar siswa terlibat secara aktif seoptimal mungkin. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator yang memantik rasa ingin tahu dan penjelajahan siswa, bukan sebagai pemegang tunggal pengetahuan. Pendekatan pembelajaran aktif yang diterapkan meliputi *Project Based Learning*, *Inquiry Learning*, *Collaborative Learning*, *Outdoor Learning*, dan *Authentic Learning*, yang diperkuat dengan pemanfaatan teknologi secara luas demi meningkatkan capaian belajar siswa (Saputra et al., 2024).

Kementerian Pendidikan New Zealand juga meluncurkan program *Digital Technologies & Hangarau Matihiko* yang memadukan teknologi digital ke dalam beragam aspek pendidikan. Program ini tidak terbatas pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup literasi digital dalam arti luas, termasuk etika bermedia dan keamanan di ruang daring (Saputra et al., 2024).

Sistem Penilaian Autentik

Model penilaian yang diterapkan di New Zealand sangat berbeda dengan ujian nasional yang masih mendominasi di banyak negara berkembang. Penilaian di negara ini lebih mengutamakan *assessment for learning* ketimbang *assessment of learning*, yang dilaksanakan melalui portofolio, pengamatan, refleksi diri, dan pemberian umpan balik secara terus-menerus (Saputra et al., 2024). Dengan pola tersebut, guru memperoleh keleluasaan lebih besar untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna tanpa dibebani tekanan ujian yang berlebihan.

Menurut Mutch (2012), terbentuknya budaya asesmen yang berkelanjutan di New Zealand mensyaratkan peralihan orientasi dari *assessment of learning* ke arah *assessment for learning* dan *assessment as learning*, sehingga peserta didik turut berperan aktif dalam merenungkan proses belajarnya. Crooks (2011) menambahkan bahwa New Zealand tergolong mampu menjaga orientasi *assessment for learning* meskipun tekanan akuntabilitas terus meningkat, salah satunya karena tidak memberlakukan ujian nasional berisiko tinggi di jenjang pendidikan dasar.

Kecenderungan tersebut didukung oleh hasil-hasil kajian internasional. Black dan Wiliam (1998) membuktikan bahwa penerapan asesmen formatif yang lebih kuat di dalam kelas secara konsisten mendorong peningkatan hasil belajar, khususnya bagi siswa dengan capaian rendah. Sementara itu, Hattie dan Timperley (2007) menyatakan bahwa umpan balik yang mampu memperjelas sasaran belajar, posisi capaian siswa saat ini, dan langkah perbaikan selanjutnya termasuk faktor yang paling kuat memengaruhi prestasi belajar. Dalam konteks Indonesia, temuan tersebut menegaskan pentingnya asesmen formatif dalam Kurikulum Merdeka agar tidak sekadar menjadi tuntutan administratif.

Profesionalisme Guru sebagai Pilar Kualitas

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh guru. Di New Zealand, guru memperoleh otonomi yang luas untuk merancang pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan siswa, sekaligus menjalankan peran sebagai fasilitator profesional yang senantiasa mengasah kompetensinya melalui program pengembangan profesional berkelanjutan dan dukungan komunitas belajar (*learning community*) (Saputra et al., 2024).

Salah satu faktor penentu keberhasilan New Zealand adalah besarnya investasi pada pengembangan profesional guru. McChesney et al. (2024) mengungkapkan bahwa pengembangan profesional guru di negara tersebut sebagian besar bertumpu pada kegiatan pembelajaran profesional yang terstruktur dan bimbingan dari para ahli. Kendati demikian, mereka juga menekankan perlunya porsi yang lebih besar bagi pembelajaran yang diinisiasi oleh guru sendiri (*teacher-directed learning*) agar lebih tanggap terhadap persoalan riil di kelas. Pandangan ini selaras dengan Darling-Hammond (2017) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan berkinerja tinggi secara terencana menanamkan investasi pada penyiapan calon guru yang bermutu serta pembelajaran profesional berkelanjutan yang menyatu dengan praktik di sekolah.

I

Integrasi Budaya Maori: Biculturalism dalam Pendidikan

Kekhasan lain dari sistem pendidikan New Zealand terletak pada komitmennya terhadap pendidikan bikultural (*bicultural education*). Nilai-nilai budaya Maori sebagai masyarakat asli New Zealand dimasukkan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran, antara lain melalui penggunaan bahasa Maori, penghargaan terhadap nilai-nilai setempat, pembelajaran multikultural, dan kerja sama antara sekolah dan komunitas adat.

Hunter et al. (2016) menunjukkan bahwa penghargaan terhadap bahasa dan nilai budaya Pasifika, disertai hubungan yang saling menghormati antara guru, siswa, dan keluarga, mampu meneguhkan identitas budaya sekaligus mendongkrak prestasi belajar siswa Pasifika. Temuan ini menegaskan bahwa kesetaraan pendidikan bagi kelompok minoritas hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan pedagogis yang benar-benar menghormati jati diri budaya peserta didik.

Hal senada tampak pada program Te Kotahitanga yang diteliti oleh Bishop et al. (2009). Melalui program pengembangan profesional tersebut, guru dibekali kemampuan menerapkan pedagogi relasional yang peka terhadap budaya siswa Maori, dan program ini terbukti turut meningkatkan keterlibatan serta prestasi belajar mereka. Dengan demikian, integrasi budaya setempat semestinya tidak berhenti pada isi kurikulum, melainkan perlu diwujudkan dalam praktik mengajar guru sehari-hari.

Relevansi dan Inspirasi bagi Penguatan Mutu Pendidikan Indonesia

Telaah atas sistem pendidikan New Zealand menghasilkan beberapa gagasan konkret yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat mutu pendidikan di Indonesia.

Perbandingan aspek-aspek utama beserta implikasinya bagi Indonesia dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Aspek Kunci Sistem Pendidikan New Zealand dan Relevansinya bagi Indonesia

Aspek	New Zealand	Relevansi bagi Indonesia
Kurikulum	Berorientasi kompetensi kunci (<i>key competencies</i>), luwes, dan kontekstual dengan kehidupan nyata (NZC)	Kurikulum Merdeka bergerak ke arah yang sama; implementasi di kelas masih perlu diperkuat
Metode Pembelajaran	Berbasis inkuiri dan proyek, berpusat pada siswa, kolaboratif, serta ditunjang teknologi	Pembelajaran aktif berbasis proyek perlu diperluas pada semua jenjang
Sistem Penilaian	<i>Assessment for learning</i> melalui portofolio, pengamatan, refleksi, dan umpan balik berkesinambungan	Asesmen formatif pada Kurikulum Merdeka perlu dipertajam dan diterapkan secara konsisten
Profesionalisme Guru	Otonomi luas, pengembangan profesional berkelanjutan, dan penelitian tindakan	Optimalisasi Komunitas Belajar Guru (KBG) dan Pelatihan Mandiri PMM
Pendidikan Inklusif	Bebas biaya hingga SMA, layanan khusus bagi ABK, dan standar mutu yang merata	Infrastruktur dan layanan ABK di daerah terpencil perlu diratakan
Budaya Lokal	Budaya Maori terintegrasi dalam kurikulum dan praktik pembelajaran	Kearifan lokal dan budaya Nusantara diintegrasikan dalam pembelajaran
Akses Digital	Jaringan internet menjangkau hampir semua wilayah; didukung inisiatif <i>Digital Technologies</i>	Pemerataan akses internet dan perangkat di daerah 3T perlu dipercepat

Sumber: diolah dari Saputra et al. (2024); Bishop et al. (2009); Court & O'Neill (2011); Crooks (2011); Darling-Hammond (2017); Hunter et al. (2016); MacArthur & Rutherford (2016); Mutch (2012); OECD (2019, 2022); Rokayah et al. (2023)

Merujuk pada perbandingan di atas, sedikitnya terdapat tujuh praktik yang layak diadaptasi oleh Indonesia. Pertama, memperkuat pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sehingga tidak hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan, mengingat penolakan sebagian guru dan terbatasnya sumber daya masih menjadi hambatan utama di tingkat kelas (Rokayah et al., 2023). Kedua, memperluas penerapan pembelajaran aktif berbasis proyek dan inkuiri, termasuk menimbang kemungkinan desentralisasi pengelolaan sekolah seperti yang ditempuh melalui reformasi *Tomorrow's Schools* (Court & O'Neill, 2011). Ketiga, mengokohkan asesmen autentik dan formatif yang menitikberatkan proses belajar, alih-alih hanya hasil akhir (Black & William, 1998; Crooks, 2011).

Keempat, menanamkan investasi pada peningkatan profesionalisme guru sebagai fasilitator yang terus belajar (Saputra et al., 2024; McChesney et al., 2024), sejalan dengan arah Platform Merdeka Mengajar (PMM). Kelima, mempercepat pemerataan sarana dan akses digital, sebab terbatasnya jaringan internet di wilayah terpencil masih menjadi penghalang bagi pemerataan mutu pendidikan. Keenam, memperkuat

pengintegrasian kearifan lokal dan budaya Nusantara dalam kegiatan belajar, seiring dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, terutama dimensi gotong royong yang terbukti dapat ditumbuhkan melalui penataan ulang praktik sekolah ramah anak (Suminar et al., 2023). Ketujuh, mempererat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan Hunter et al. (2016), karena pendidikan yang bermutu tidak mungkin diwujudkan oleh sekolah seorang diri.

SIMPULAN

Banyak pelajaran bernilai yang dapat dipetik Indonesia dari sistem pendidikan New Zealand. Keberhasilan sistem tersebut bertumpu pada perpaduan antara kurikulum berorientasi kompetensi yang luwes, pembelajaran berbasis inkuiri yang menempatkan siswa sebagai pusat, asesmen autentik yang menopang perkembangan belajar, guru dengan profesionalisme tinggi, komitmen kuat pada pendidikan inklusif, serta penghormatan yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya Maori. Perpaduan berbagai faktor itulah yang mengantarkan New Zealand menjadi salah satu sistem pendidikan terkemuka di dunia.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transformasi pendidikan lewat Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila, praktik-praktik unggul New Zealand dapat dijadikan bahan cerminan dan sumber inspirasi. Meski demikian, proses adaptasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Perbedaan kondisi geografis, demografis, sosial-budaya, dan kapasitas kelembagaan Indonesia menuntut penyesuaian yang cermat dan kontekstual, karena kebijakan yang diadopsi dari negara lain perlu diinternalisasi dan diselaraskan dengan karakter lokal agar dapat berjalan efektif di negara penerimanya (Phillips & Ochs, 2003). Hal yang paling utama ialah menghadirkan semangat serupa, yakni memosisikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator profesional, dan pendidikan sebagai hak bagi setiap anak tanpa pengecualian.

Studi lanjutan disarankan untuk menguji secara empiris penerapan praktik unggul New Zealand di sekolah-sekolah Indonesia, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67–75. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995>
- Bishop, R., Berryman, M., Cavanagh, T., & Teddy, L. (2009). Te Kotahitanga: Addressing educational disparities facing Māori students in New Zealand. *Teaching and Teacher Education*, 25(5), 734–742. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.01.009>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Court, M., & O'Neill, J. (2011). Tomorrow's Schools in New Zealand: From social democracy to market managerialism. *Journal of Educational Administration and History*, 43(2), 119–140. <https://doi.org/10.1080/00220620.2011.560257>
- Crooks, T. J. (2011). Assessment for learning in the accountability era: New Zealand. *Studies in Educational Evaluation*, 37(1), 71–77. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.002>

- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Hunter, J., Hunter, R., Bills, T., Cheung, I., Hannant, B., Kritesh, K., & Lachaiya, R. (2016). Developing equity for Pāsifika learners within a New Zealand context: Attending to culture and values. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 51(2), 197–209. <https://doi.org/10.1007/s40841-016-0059-7>
- MacArthur, J., & Rutherford, G. (2016). Success for all? Re-envisioning New Zealand schools and classrooms as places where 'rights' replace 'special'. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 51(2), 157–174. <https://doi.org/10.1007/s40841-016-0066-8>
- McChesney, K., Gurney, L., & Chivers, M. (2024). Teacher professional learning and development research in Aotearoa New Zealand: A scoping review of literature, 2010–2023. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 59(2), 463–486. <https://doi.org/10.1007/s40841-024-00335-5>
- Mutch, C. (2012). Assessment for, of and as learning: Developing a sustainable assessment culture in New Zealand schools. *Policy Futures in Education*, 10(4), 374–385. <https://doi.org/10.2304/pfie.2012.10.4.374>
- OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3197152b-en>
- Phillips, D., & Ochs, K. (2003). Processes of policy borrowing in education: Some explanatory and analytical devices. *Comparative Education*, 39(4), 451–461. <https://doi.org/10.1080/0305006032000162020>
- Rokayah, Hermita, N., Vebrianto, R., Mujtahid, I., Sulistiyo, U., & Samsudin, A. (2023). Reflection of Indonesian educators on the implementation of the Merdeka curriculum. *Mimbar Sekolah Dasar*, 10(3), 684–700. <https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v10i3.64864>
- Saputra, A., Fitri, N., Ananda, A., Rusdinal, & Gistituati, N. (2024). Analysis of education programs in New Zealand. *Journal of Vocational Education and Information Technology*, 5(2), 83–87. <https://doi.org/10.56667/jveit.v5i2.1428>
- Schleicher, A. (2018). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264300002-en>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suminar, R. K., Narimo, S., Minsih, Prastiwi, Y., & Rahmawati, L. E. (2023). Reconstruction of child-friendly school through Pancasila student profiles dimensions of mutual cooperation. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(1), 104–113. <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i1.55686>